

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan Penyusunan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran adalah sebuah perencanaan kerja yang dapat diukur serta anggaran merupakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh perusahaan / instansi yang adapun kegiatan tersebut dilakukan dalam suatu priode.
2. Proses Penyusunan Anggaran meliputi 3 tahap, yaitu: *Planning and Preparation, Tahap Implementasi, Tahap Pengendalian.*
3. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahi yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsi sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

d. Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan bahwa APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah. Dengan APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama satu tahun. Dengan adanya APBD, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

7. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan.

5.2 Saran

Saran penulis untuk sekretarian DPRD untuk lebih meningkatkan pembukuannya dalam kegiatan belanja perjalanan dinas sekretariat DPRD, lebih bagusnya disimpan dalam satu tempat yang sama dengan arsip belanja perjalanan dinas periode tahun sebelumnya.

